

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Menyerahkan LHP Kinerja atas Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama
Industri Dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya untuk Tahun Anggaran
2020 Dan Semester I 2021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya untuk tahun anggaran 2020 dan Semester I 2021. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup penyelenggaraan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2020 dan Semester I 2021 dengan sasaran meliputi 5 aspek, yaitu:

1. peningkatan peran dan kerja sama industri dan dunia kerja dalam pendidikan vokasi;
2. reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi;
3. peningkatan kualitas pendidik vokasi;
4. penguatan tata kelola pendidikan vokasi; dan
5. penguatan sistem sertifikasi kompetensi.

Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya untuk Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. LHP diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono didampingi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

BPK mencatat upaya dan capaian positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, diantaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya mengidentifikasi kebutuhan guru Sekolah Menengah Kejuruan dengan membuat peta kebutuhan guru pendidik vokasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan sesuai dengan kebutuhan pendidik vokasi per Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan yang terdiri dari Muatan Nasional, Muatan Kewilayahan dan Muatan Perminatn Kejuruan.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian untuk segera diperbaiki oleh Pemprov Kalteng, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama industri dan dunia kerja.
2. Penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan industri dan dunia kerja.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum mengelola informasi pasar kerja dan *tracer study* secara optimal.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum mendorong satuan pendidikan vokasi untuk menerapkan sistem fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/ *teaching factory*/ *teaching industry*.

Apabila permasalahan signifikan tersebut tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan kewenangannya, antara lain untuk:

1. Menetapkan kebijakan berupa Peraturan Kepala Daerah yang dapat mendorong peningkatan peran Iduka dalam pendidikan vokasi;
2. Membuat MoU dengan KADIN Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong Iduka Kalimantan Tengah membuka akses yang lebih luas untuk magang siswa, magang guru dan guru tamu serta mendorong Iduka untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory*;
3. Membuat MoU dengan Iduka (menengah/besar) untuk kegiatan PKL siswa SMK, magang guru dan mendatangkan guru tamu terutama Iduka Pertambangan Batubara guna meningkatkan SMK yang memiliki kompetensi keahlian geologi pertambangan;
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun perencanaan peningkatan kompetensi guru produktif termasuk di dalamnya melakukan diklat, magang dan pemerolehan sertifikat kompetensi secara memadai serta mengadakan bimbingan teknik/sosialisasi kepada sekolah terkait adanya aplikasi dari Pusat (SIM PKB) dan program *upskilling reskilling*;
5. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dalam menyusun kajian terkait sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi sehingga memudahkan bagi lulusan pendidikan vokasi untuk mengidentifikasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya serta memudahkan Industri/pengusaha untuk mencari tenaga kerja sesuai kebutuhannya; dan
6. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun pedoman pengelolaan keuangan yang fleksibel dan akuntabel untuk manajemen pengelolaan unit produksi atau *teaching factory* atau *teaching industry* serta mensosialisasikannya kepada satuan pendidikan terkait.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id